

# Membangun Budaya Antikorupsi

disampaikan dalam Webinar Nasional Antikorupsi

Jakarta, 19 Agustus 2025

WAWAN WARDIANA

Deputi Bidang Pendidikan dan  
Peran Serta Masyarakat





## RIWAYAT PEKERJAAN

### **KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) RI**

- 2021-sekarang : Deputi Bidang Pendidikan & Peran Serta Masyarakat
- 2016-2021 : Direktur Penelitian dan Pengembangan
- 2015-2018 : Plt Koordinator Unit Kerja Korsupgah
- 2013-2015 : Kepala Satuan Tugas Direktorat Litbang

### **Puslit INKOM-LIPI (Informatika dan Komputer)**

- 2001-2005 : Kepala SubBidang Sarana Penelitian Komputer
- 2005-2013 : Kepala Bidang Penelitian Komputer
- 1999-2021 : Peneliti Bidang Rekayasa Perangkat Lunak

### **LEN (Lembaga Elektroteknika Nasional)**

- 1986-1999 : Pelaksana dan Koordinator Proyek di UPT-LEN

## RIWAYAT PENDIDIKAN

- Doktor, Ilmu Komunikasi, UNPAD Bandung
- Magister Teknik, Teknik Informatika, ITB, Bandung
- Sarjana, Teknik Informatika, STT-Mandala Bandung

**WAWAN WARDIANA**

# KORUPSI



# Korupsi

Berasal dari bahasa Latin: **corruptio**, dari kata kerja **corrumpere**, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok

Secara harfiah berarti: **Kebusukan, Keburukan, Kebejatan, Ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral**

Setiap orang yang dengan **sengaja melawan hukum** untuk melakukan perbuatan dengan tujuan **memperkaya** diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan **kerugian keuangan negara atau perekonomian negara**

(UU No 31 Tahun 1999 juncto. UU No 20 Tahun 2001)



Korupsi adalah **perilaku pejabat publik**, baik politikus politisi maupun pegawai negeri, yang secara **tidak wajar** dan tidak legal **memperkaya** diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan **menyalahgunakan kekuasaan** publik yang dipercayakan kepada mereka (Transparansi Internasional)

# Jenis Korupsi



## Petty Corruption

*Petty corruption/bureaucratic corruption* (korupsi kecil) merujuk pada tindakan korupsi yang dilakukan dalam skala kecil atau rendah, melibatkan pejabat atau individu yang memiliki kekuasaan terbatas



## Grand Corruption

*Grand corruption* (korupsi besar) merujuk pada tindakan korupsi yang dilakukan dalam skala besar, melibatkan pejabat tinggi atau institusi penting, dan seringkali memiliki dampak signifikan pada masyarakat dan ekonomi



## State Capture Corruption

*State capture* merupakan korupsi dengan merubah regulasi yang dilakukan sebelum adanya kebijakan atau bahkan dengan membuat kebijakan yang korup. Esensi dari *state capture* adalah adanya jaringan (*clandestine networks*) dimana aktor publik dan privat berkolusi di sekitar organ dan fungsi negara dan kontrak sosial dan beroperasi tanpa akuntabilitas

(Bhorat et al., 2017 dalam Emrizal et al., 2023)

# JENIS TIPIKOR

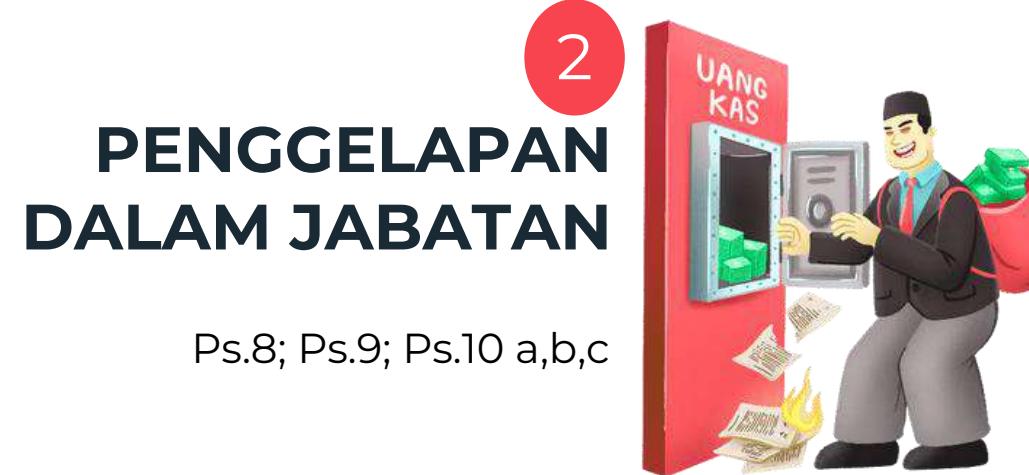
Korupsi dirumuskan dalam 30 jenis tipikor, dikelompokkan menjadi 7 jenis besar.

Sumber: UU No.31/1999 jo UU No.20/2001



## KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Ps. 2, Ps. 3  
(penyalahgunaan wewenang)



## PENGGELAPAN DALAM JABATAN

Ps.8; Ps.9; Ps.10 a,b,c



## PERBUATAN CURANG

Ps.7(1) a,b,c,d; Ps.7(2);  
Ps.12 h



## PEMERASAN

Ps.12 e,f,g

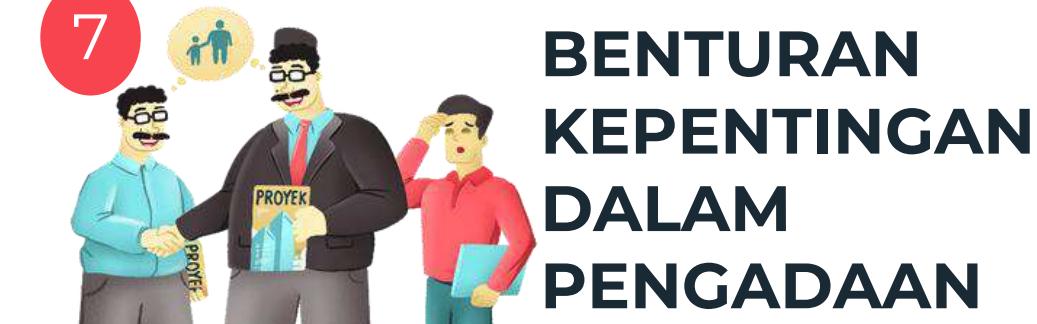


## GRATIFIKASI

Ps. 12 B jo Ps.12 C

## SUAP-MENYUAP

Ps.5(1) a,b; Ps.13; Ps.5(2);  
Ps.12 a,b; Ps.11; Ps.6(1) a,b;  
Ps.6(2); Ps.12 c,d



## BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN

Ps. 12i

## TINDAK PIDANA LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KORUPSI

- 1. Merintangi pemeriksaan
- 2. Keterangan kekayaan
- 3. Keterangan rekening
- 1. Keterangan palsu
- 2. Identitas pelapor



Pemahaman pasal 2 UU 31/1999 jo. UU 20/2001  
Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.

# PAHAMAI BEDANYA



**Contoh:**  
Pengusaha memberi hadiah voucher belanja kepada PNS karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan

**Contoh:**  
Pengusaha menuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek

**Contoh:**  
Pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman akan menggugurkan calon peserta tersebut

# Faktor Penyebab Korupsi

**FRAUD DIAMOND THEORY** (Wolfe & Hermanson, 2004)

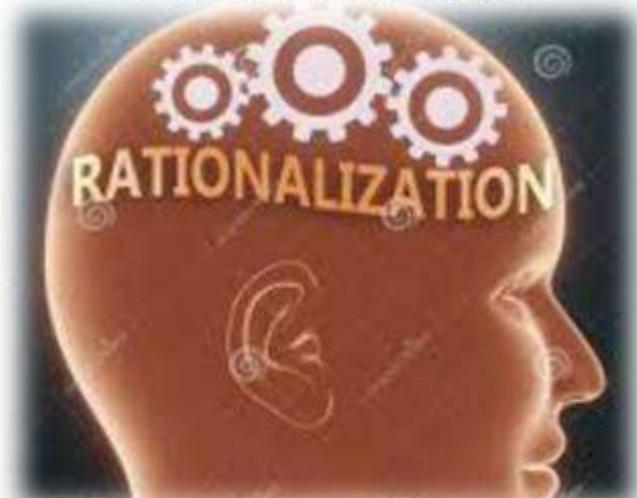
tekanan



kesempatan



rasionalisasi



kapabilitas





# INTEGRITAS

# Integritas

***“Keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan dengan standar norma / hukum / nilai yang berlaku.”***

***“Bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, baik nilai kode etik di tempat kerja, nilai jabatan, nilai masyarakat, ataupun nilai moral pribadi.”***



# Formula Integritas

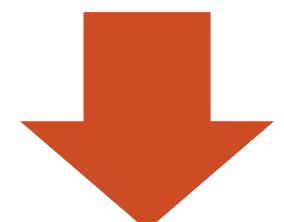
**Organization Integrity = ( A + C1 + E ) - C2**

**(A) Accountability = Enabling stakeholders to check that we do what we say we do**

**(C1) Competence = Doing it well**

**(E) Ethics = Doing it with honor and with public purpose**

**(C2) Corruption = Doing it without corruption (corruption control)**



**INTEGRITAS PRIBADI + INTEGRITAS SISTEM**



## NILAI ANTIKORUPSI

Mandiri

Disiplin

Peduli

Jujur

Tanggung jawab

Berani

Kerja keras

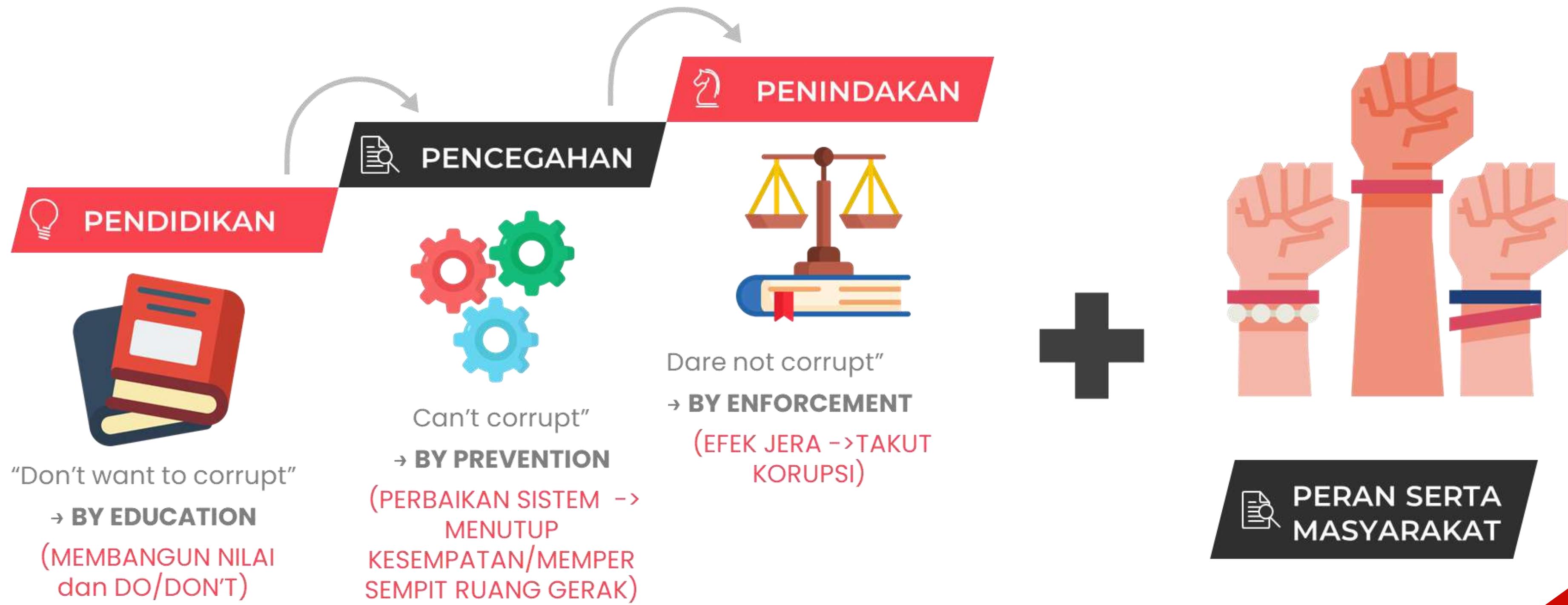
Sederhana

Adil

An illustration of a hand holding several cartoonish fingers. Each finger has a unique expression and a small red cap or hat. Dashed lines connect the names of the values to their corresponding fingers: Mandiri (middle finger), Disiplin (index finger), Peduli (ring finger), Jujur (pinky finger), Tanggung jawab (thumb), Berani (ring finger), Kerja keras (middle finger), and Sederhana (index finger). The hand is shown from the side, gripping the fingers.

# STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI

# STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK





# Membangun Budaya Integritas

Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan membangun budaya antikorupsi. Budaya mempengaruhi kehidupan manusia, nilai dan cara pandang beragam aksi turunan, serta pengambilan keputusan.

## Langkah-langkahnya

### Pendidikan Nilai Antikorupsi

Menanamkan dan mengimplementasikan sembilan nilai antikorupsi pada diri sendiri dan keluarga (JUMAT BERSEPEDA KK)

### Kampanye dan Sosialisasi

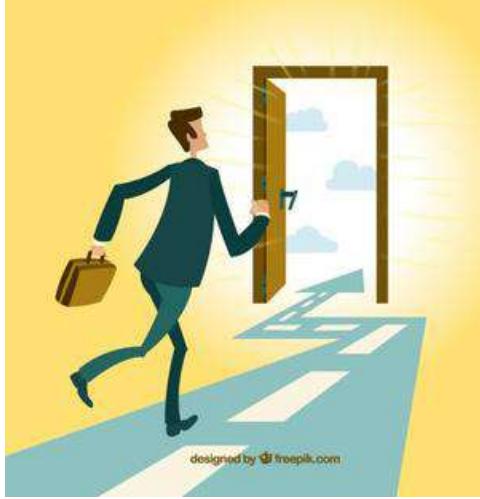
Memberikan pemahaman kesadaran antikorupsi bagi masyarakat dengan kegiatan kampanye dan sosialisasi

### Pemberdayaan Masyarakat

Memberikan contoh dan mengajak masyarakat untuk berperan serta di lingkungan sekitarnya sesuai dengan perannya

# Apa yang bisa dilakukan?

sumber: materi sosialisasi antikorupsi



Menghindari COI  
(PBJ, rotasi/  
mutasi/rekrutmen,  
rangkap jabatan, dst)



Memberikan  
contoh/keteladanan



Menolak  
gratifikasi



Menjaga integritas  
dalam menjalankan  
tugas dan kehidupan  
sehari-hari

# PERAN SAYA

## Sebagai ASN

Menjalankan amanah dengan sungguh-sungguh, ikhlas, penuh integritas, profesional, dan mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kantor



- **No Bribery** : menolak suap
- **No Kickback** : menolak fee dari rekanan
- **No Gift** : menolak gratifikasi
- **No luxurious hospitality**: menolak fasilitas dinas yang mewah

# PERAN SAYA

## Sebagai Orangtua

Bersama-sama pasangan menanamkan karakter anti korupsi (misalnya kejujuran) sedini mungkin kepada anak-anak di rumah

## Sebagai Suami/Isteri

Menjalankan fungsi sebagai auditor keuangan rumah tangga (aliran dana rumah tangga), saling mengingatkan/memberikan ruh integritas pada semua aktivitas keluarga

## Berperan Secara Sosial

Memberikan teladan dan menyerukan gerakan anti korupsi mulai dari lingkup terkecil di sekitar rumah. Membiasakan akrab mengenali dan empati terhadap orang lain yang kekurangan



# Program Pelatihan dan Sertifikasi Antikorupsi

Kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK



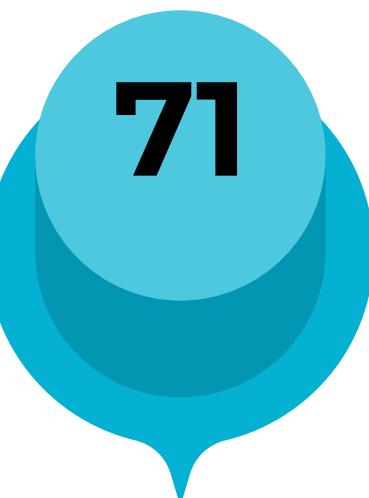
orang pejabat eselon 1 Kementerian Hukum dan HAM mengikuti Kegiatan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) pada tahun 2021



orang pejabat eselon 2 dan 3 Kementerian Hukum dan HAM mengikuti Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas(PRESTASI) selama tahun 2023 - 2024 yang terbagi menjadi 3 batch. Duta (alumni) PRESTASI melakukan implementasi Rencana Aksi Aktualisasi Integritas pada satuan kerja dalam bagian upaya pembangunan budaya integritas



orang Kementerian Hukum dan HAM mengikuti Pelatihan Calon Penyuluhan Antikorupsi (PELOPOR) pada tahun 2021



orang Kementerian Hukum dan HAM menjadi Calon Penyuluhan Antikorupsi (PAKSI)



orang Kementerian Hukum dan HAM menjadi Ahli Pembangun Integritas (API)



# Follow Us!

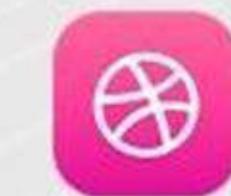
Ikuti informasi terbaru mengenai materi pembelajaran dan pendidikan antikorupsi, sertifikasi penyuluhan antikorupsi dan kegiatan publik ACLC KPK.



aclc.kpk



ACLC KPK



aclc.kpk.go.id



aclc.kpk



ACLC KPK